

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyani, T. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Danialsyah, L. M., & Siregar, M. (2023). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung.
- Nita, M. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV Laduny Alifatama.
- Rohamdi. (2023). *Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Jurnal

- Asmar, N., Roza, D., & Syofiarti. (2023). Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *UNES Journal Of Swara Justitia*, 7(2), 557–574.
- Asnawi. (2020). Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan). *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 112-126.
- Hasmin, Rahman, S., & Bachmid, F. (2024). Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan Umum Menurut Hukum Acara Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 716–730.
- Nugraheni, D. B. (2020). Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 251–266.
- Onibala, J., Londa, J., & Lembong, R. (2021). Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata. *Lex Privatum*, 9(6), 180–189.
- Ramadana, F., & Talli, H. (2021). Akibat Tidak Ada Izin Poligami Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1), 265–179.
- Rohayati, D. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm). *Indonesian Notary*, 2(11), 702–727.

Simanungkalit, D., *et al.* (2023). Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(4), 284-298.

Vinabilah, V., Kusmayanti, H., & Nasution, F. (2024). Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama yang Diajukan Atas Dasar Paksaan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 268–283.

Lain-Lain

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 648/Pdt.G/2025/PA.Mr perihal Pembatalan Perkawinan, 25 Maret 2025.

Pengadilan Agama Mojokerto (2025). <https://pa-mojokerto.go.id/>, diakses pada pukul 20.46, tanggal 21 Mei 2025.

Pengadilan Agama Mojokerto (2025). <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>, diakses pada pukul 21.00, tanggal 21 Mei 2025.

Pengadilan Agama Mojokerto (2025). <https://mail.pa-bangil.go.id/halaman/detail/arti-lambang>, diakses pada pukul 21.30, tanggal 21 mei 2025.

Pengadilan Agama Mojokerto (2025). <https://www.pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada pukul 09.42, tanggal 25 Mei 2025.

Pengadilan Agama Mojokerto (2025). <https://pa-mojokerto.go.id/layanan-hukum/tingkat-prosedurperkara/prosedurberperkara-tingkat-pertama>,

diakses pada pukul 18.16, tanggal 31 Mei 2025.

Pengadilan Agama Mojokerto (2025). <https://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pejabat-pegawai/struktur-organisasi>, diakses pada pukul

22.48, tanggal 01 Juni 2025.

Pengadilan Agama Mojokerto (2025). <https://www.pa-mojokerto.go.id/hubungi-kami/laporan/laporan-tahunan>, diakses pada pukul 17.00, tanggal 26 Juni

2025.

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Drs. Amar Hujantoro, S.H. pada tanggal 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Petugas PTSP Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Abdurrahim Syam, SH. pada tanggal 28 Mei 2025.